

**RENCANA AKSI KINERJA**  
**SATUAN POLISI PAMONG PRAJA**  
**KABUPATEN PURWAKARTA**



**TAHUN ANGGARAN 2023**

## KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadirat Allah SWT Tuhan Yang Maha Esa yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya, sehingga penyusunan Rencana Aksi Kinerja (RAK) Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Purwakarta Tahun 2023 dapat terselesaikan. RAK merupakan upaya Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Purwakarta meningkatkan pencapaian sasaran sampai dengan kegiatan sesuai dokumen perencanaan yang ditetapkan.

RAK Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Purwakarta disusun berdasarkan pada Rencana Kerja Tahun 2023, serta penetapan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Tahun 2023 yang bertujuan untuk mendongkrak pencapaian indikator kinerja dari level sasaran sampai dengan level kegiatan.

Secara substantif RAK Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Purwakarta menjadi pendorong unit kerja pada struktur organisasi Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Purwakarta dalam melaksanakan program/kegiatan yang melekat yang berdampak pada pencapaian sasaran-sasaran yang ditetapkan.

Kami menyadari bahwa penyusunan RAK Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Purwakarta Tahun 2023 ini belum sepenuhnya sempurna, karena itu saran konstruktif dibutuhkan.

Purwakarta, 04 Januari 2023

**Kepala Satuan Polisi Pamong Praja  
Kabupaten Purwakarta**



**AULIA PAMUNGKAS, ST, M.Si**  
PURWAKARTA 10810623 200604 1 008

## DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i	
DAFTAR ISI	ii	
BAB I	SASARAN STRATEGIS DAN IKU SATPOL PP	1
	1.1. Sasaran Strategis	1
	1.2. IKU dan Formulasi Penghitungan Target Tahun 2023	3
	1.3. Landasan Hukum	5
	1.4. Dasar Pemikiran	7
	1.5. Struktur Satpol PP Kab. Purwakarta	7
BAB II	RENCANA AKSI SATPOL PP	8
	2.1. Rencana Aksi Satpol PP Kab. Purwakarta	8
BAB III	PENUTUP	14

**BAB I**

**SASARAN STRATEGIS DAN INDIKATOR KINERJA UTAMA**

**SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KABUPATEN**

**PURWAKARTA**

**1.1. Sasaran Strategis.**

Sasaran Strategis Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Purwakarta didasarkan pada tujuan yang ditetapkan dalam Rencana Strategis, sebagaimana dituangkan pada tabel dibawah ini :

<b>No</b>	<b>Tujuan</b>	<b>Sasaran Strategis</b>	<b>Keterangan</b>
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Mewujudkan Tatakelola Managemen Perkantoran yang Efektif dan Efisien	Meningkatnya Penataan Managemen Perkantoran yang Efektif dan Efisien	
2	Terwujudnya Kepatuhan Masyarakat/Badan Hukum Terhadap Peraturan Daerah dan Peraturan Pelaksanaannya	Berkurangnya Pelanggaran Terhadap Peraturan Daerah dan Peraturan Pelaksanaannya	
3	Terwujudnya Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat di Kabupaten Purwakarta	Berkurangnya Gangguan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat di Kabupaten Purwakarta	

4	Terwujudnya Pelayanan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat di Kabupaten Purwakarta	Meningkatnya Pelayanan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat di Kabupaten Purwakarta	
5	Terwujudnya Kapasitas Sumber Daya Aparatur Satpol. PP yang Berkualitas dan Profesional	Meningkatnya kualitas dan Profesionalisme Kapasitas Sumber Daya Aparatur Satpol. PP	
6	Terwujudnya Perlindungan Masyarakat di Kabupaten Purwakarta	Meningkatnya Perlindungan Masyarakat di Kabupaten Purwakarta	

**1.2. Indikator Kinerja Utama dan Formulasi Penghitungan Target Tahun 2023.**

<b>No</b>	<b>Sasaran Strategis</b>	<b>Indikator Tujuan / Sasaran / IKU</b>	<b>Formulasi Penghitungan Target</b>
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Meningkatnya Penataan Managemen Perkantoran Yang Efektif dan Efisien	Capaian SAKIP Perangkat Daerah	Opini Capaian SAKIP Perangkat Daerah
		Persentase pemenuhan penunjang pelayanan perkantoran	Jumlah Persentase Pemenuhan Penunjang Pelayanan Kantor x100%
2	Berkurangnya Pelanggaran Terhadap Peraturan Daerah dan Peraturan Pelaksanaannya	Frekuensi pembinaan, pengawasan dan penyuluhan terhadap masyarakat, aparatur atau badan hukum	Jumlah kegiatan pembinaan, pengawasan dan penyuluhan terhadap masyarakat, aparatur atau badan hukum yang dilaksanakan dibagi jumlah kasus yang harus diangani x100%
		Persentase kasus pelanggaran peraturan perundang-undangan daerah dan ketertiban umum yang tertangani	Jumlah kasus pelanggaran peraturan perundang-undangan daerah dan ketertiban umum yang tertangani dibagi jumlah kasus yang harus diangani x100%
3	Berkurangnya Gangguan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat di Kabupaten Purwakarta.	Frekuensi pelaksanaan operasi dan pengendalian/ penertiban trantibmas	Jumlah kegiatan operasi dan pengendalian/ penertiban trantibmas yang dilaksanakan
		Frekuensi pelaksanaan kerjasama, pengawasan, pencegahan dan penertiban terhadap asset daerah	Jumlah kegiatan kerjasama, pengawasan, pencegahan dan penertiban terhadap asset daerah yang dilaksanakan

4	Meningkatkan Pelayanan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat di Kabupaten Purwakarta.	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan akibat dari penegakan hukum perda dan perkara	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan akibat dari penegakan hukum perda dan perkara dibagi jumlah warga negara yang diberikan pembinaan x100%
5	Meningkatkan Kualitas dan Profesionalisme Kapasitas Sumber Daya Aparatur Aparatur Satpol. PP	Tingkat pemenuhan kebutuhan diklat/bimtek satpol pp yang diselenggarakan	Jumlah diklat/bimtek satpol pp yang diselenggarakan dibagi jumlah diklat/bimtek satpol pp yang dibutuhkan x100%
		Persentase Anggota Satpol. PP. yang dibina Karena Pelanggaran Disiplin (PNS / Non PNS)	Jumlah anggota satpol pp yang dibina dibagi jumlah seluruh anggota satpol pp x100%
6	Meningkatnya Perlindungan Masyarakat di Kabupaten Purwakarta.	Persentase anggota satlinmas yang dibina	Jumlah anggota satlinmas yang dibina dibagi jumlah seluruh anggota satlinmas x100%
		Banyaknya pembinaan potensi masyarakat	Jumlah kegiatan pembinaan potensi masyarakat yang dilaksanakan

### **1.3. Landasan Hukum.**

1. Tap MPR RI Nomor XI/MPR/1998 Tahun 1998 Tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
2. Undang – Undang Nomor 4 Tahun 1968 Tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang – Undang Nomor 14 Tahun 1950 Tentang Pembentukan Daerah – Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851 );
3. Undang – Undang Nomor 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme ( Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851 );
4. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
5. Undang – Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438 );
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2006 Tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614 );

7. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Satuan Polisi Pamong Praja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6205);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 16 Tahun 2008 tentang Rencana Pembanguna Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Purwakarta Tahun 2005-2025;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 3 tahun Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Perda Nomor 1 Tahun 2019 tentang RPJMD Kabupaten Purwakarta Tahun 2018-2023;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan daerah No 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Purwakarta ;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 9 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023;
12. Peraturan Bupati Purwakarta Nomor 148 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Purwakarta;
13. Peraturan Bupati Purwakarta Nomor 228 Tahun 2016 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Purwakarta;
14. Peraturan Bupati Purwakarta Nomor 104 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja;

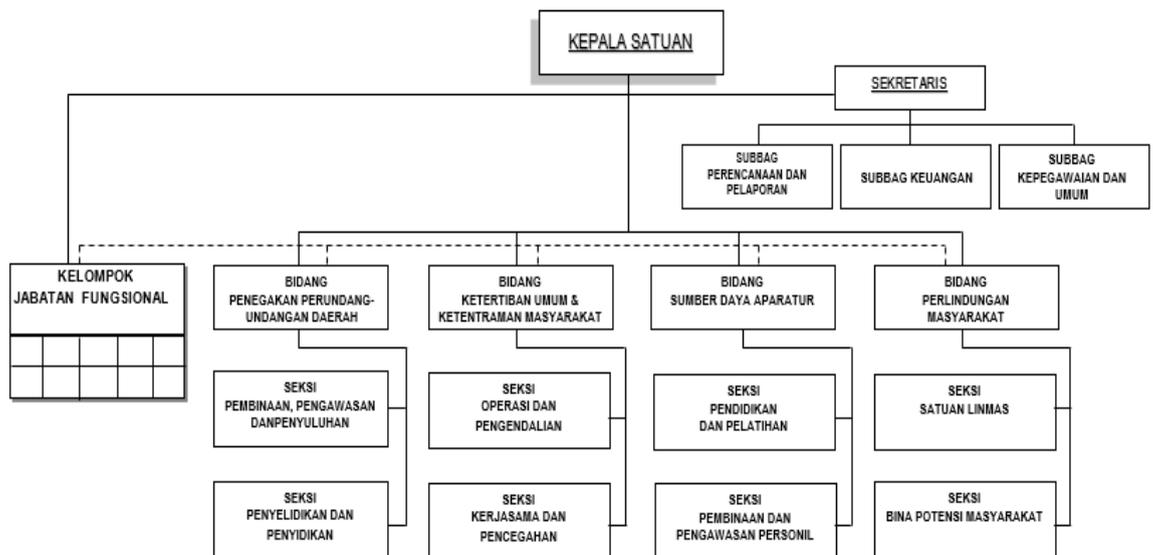
#### 1.4. Dasar Pemikiran

Dasar pemikiran Penyusunan Aksi Kinerja (RAK) Tahun 2023 ini, adalah :

1. Memacu pencapaian kinerja Satpol PP, baik pada ranah sasaran sampai dengan ranah pelaksanaan kegiatan.
2. Mengoptimalkan pelaksanaan tugas dan fungsi Satpol PP.
3. Sebagai pedoman pelaksanaan kegiatan pada Sekretariat dan Bidang-Bidang untuk mendorong pencapaian Indikator Kinerja Utama.

#### 1.5. Struktur Satuan Polisi Pamong Praja Kota Depok.

### STRUKTUR ORGANISASI SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KABUPATEN PURWAKARTA



KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA  
KABUPATEN PURWAKARTA  
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA  
AULIA HUNTKAS, ST, M.Si  
810623 200604 1 008

**BAB II**  
**RENCANA AKSI SATUAN POLISI PAMONG PRAJA**  
**KABUPATEN PURWAKARTA**

**2.1. Rencana Aksi Satuan Polisi Pamong Praja**

**RENCANA AKSI**  
**SATUAN POLISI PAMONG PRAJA**  
**KABUPATEN PURWAKARTA TAHUN 2023**

No	Sasaran Strategis	Rencana Aksi	Indikator Kinera	Target Tahunan	Target Triwulan			
					I	II	III	IV
1	<b>Meningkatnya Penataan Managemen Perkantoran yang Efektif dan Efisien</b>	Meningkatkan Capaian SAKIP Perangkat Daerah	Predikat SAKIP Satpol PP	B	B	B	B	BB
		Meningkatkan pemenuhan penunjang pelayanan perkantoran	Persentase pemenuhan penunjang pelayanan perkantoran	90%	22,5%	22,5%	22,5%	22,5%
	<b>Sasaran Kegiatan/Sub. Kegiatan :</b>							
1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah							
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Meningkatkan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dok	1 Dok	1 Dok		
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan dan Ikhtisar Realiasi Kinerja SKPD.	Meningkatkan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan dan Ikhtisar Realiasi Kinerja SKPD.	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1 Dok		1 Dok		
2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah							
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Meningkatnya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	97 Org/Bulan	97 Org/Bulan	97 Org/Bulan	97 Org/Bulan	97 Org/Bulan

	Koordinasi dan penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD.	Meningkatkan Koordinasi dan penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD.	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan					1Laporan
3	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah								
	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Meningkatkan kualitas Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	3 Paket	1 Paket	1 Paket	1 Paket		
	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Meningkatkan kualitas Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	1 Dok		1 Dok			
	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Meningkatkan Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	1 Dok		1 Dok			
	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi.	Meningkatkan kualitas Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	100 Orang	25 Orang	25 Orang	25 Orang	25 Orang	25 Orang
4	Administrasi Umum Perangkat Daerah								
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Meningkatkan kualitas Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan	1 Paket	1 Paket				
	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Meningkatkan kualitas Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang disediakan	1 Paket		1 Paket			
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Meningkatkan kualitas Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang disediakan	6 Paket	2 Paket	2 Paket	1 Paket	1 Paket	
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan.	Meningkatkan kualitas Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan.	Jumlah Paket Barang Cetak dan Pengadaan yang disediakan	1 Paket	1 Paket				
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Meningkatkan kualitas Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	3 Laporan	3Laporan	3 Laporan	3Laporan	

No	Sasaran Strategis	Rencana Aksi	Indikator Kinerja	Target Tahunan	Target Triwulan			
					I	II	III	IV
5	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah.							
	Pengadaan mebel	Meningkatkan kualitas Pengadaan mebel	Jumlah Paket Mebel yang disediakan	57 Unit	14 unit	14 unit	14 unit	14 unit
	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya.	Meningkatkan kualitas Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya.	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	7 Unit	2 Unit	2 Unit	2 Unit	1 Unit
6	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah.							
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik.	Meningkatkan kualitas Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik.	Jumlah laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang disediakan	12 Laporan	3 Laporan	3 Laporan	3 Laporan	3 Laporan
	Penyediaan jasa pelayanan umum kantor	Meningkatkan kualitas Penyediaan jasa pelayanan umum kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Yang disediakan	12 Laporan	3 Laporan	3 Laporan	3 Laporan	3 Laporan
7	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah.							
	Penyediaan jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perijinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan.	Meningkatkan kualitas Penyediaan jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perijinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan.	jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang di pelihara dan dibayarkan pajak dan perijinannya	30 Unit	7 Unit	7 Unit	8 Unit	8 Unit
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya.	Meningkatkan kualitas Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang dipelihara	15 Unit	3 Unit	3 Unit	4 Unit	5 Unit
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Meningkatkan kualitas Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/direhabilitasi	2 Unit		1 Unit	1 Unit	

No	Sasaran Strategis	Rencana Aksi	Indikator Kinerja	Target Tahunan	Target Triwulan			
					I	II	III	IV
2	<b>Berkurangnya Pelanggaran Terhadap Peraturan Daerah dan Peraturan Pelaksanaannya</b>	Meningkatkan Pembinaan, Pengawasan dan Penyuluhan Terhadap Masyarakat, Aparatur atau Badan Hukum	Frekuensi Pembinaan, Pengawasan dan Penyuluhan Terhadap Masyarakat, Aparatur atau Badan Hukum	100%	25%	25%	25%	25%
		Mengurangi kasus pelanggaran peraturan perundang-undangan daerah dan ketertiban umum yang tertangani	Persentase kasus pelanggaran peraturan perundang-undangan daerah dan ketertiban umum yang tertangani	100%	25%	25%	25%	25%
	<b>Sasaran Kegiatan/Sub. Kegiatan :</b>							
1	Penegakan Perda Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Walikota							
	Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Walikota	Meningkatkan Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Walikota	Jumlah kegiatan Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Walikota	2 Keg		1Keg	1Keg	
	Pengawasan atas Kepatuhan terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Walikota	Meningkatkan Pengawasan atas Kepatuhan terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Walikota	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pengawasan yang dilakukan terhadap Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Walikota	22 Laporan	5 Laporan	5 Laporan	7 Laporan	5 Laporan
	Penanganan atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Walikota	Meningkatkan Penanganan atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Walikota	Jumlah Laporan Pelaksanaan Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Walikota	5 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	2 Laporan

3	<b>Berkurangnya Gangguan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat di Kabupaten Purwakarta</b>	Meningkatkan Kualitas pelaksanaan operasi dan pengendalian/ penertiban trantibmas	Jumlah kegiatan pelaksanaan operasi dan pengendalian/ penertiban trantibmas	40 keg	10 keg	10 keg	10 keg	10 keg
		Meningkatkan Kualitas pelaksanaan kerjasama, pengawasan, pencegahan dan penertiban terhadap asset daerah	Jumlah kegiatan pelaksanaan kerjasama, pengawasan, pencegahan dan penertiban terhadap asset daerah	8 Keg	2 Keg	2 Keg	2 Keg	2 Keg
	<b>Sasaran Kegiatan/Sub. Kegiatan :</b>							
1	Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1(Satu) Daerah							
	Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum melalui deteksi Dini, pembinaan dan penyuluhan, pelaksanaan patroli, pengamanan dan pengawalan.	Meningkatkan Pencegahan Gangguan Ketertiban Umum melalui deteksi Dini, pembinaan dan penyuluhan, pelaksanaan patroli, pengamanan dan pengawalan.	Jumlah Kasus gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang dicegah Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawalan	95 Kasus	23 Kasus	23 Kasus	26 Kasus	23 Kasus
	Penindakan atas Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Berdasarkan Perda dan Perkada melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa.	Meningkatkan kualitas Penindakan atas Gangguan Ketertiban Umum Berdasarkan Perda dan Perkada melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa.	Jumlah Kasus Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa yang dilakukan Penindakan	30 Kasus	7 Kasus	7 Kasus	7 Kasus	9 Kasus
4	<b>Meningkatkan Pelayanan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat di Kabupaten Purwakarta.</b>	Melaksanakan Pelayanan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat di Kabupaten Purwakarta.	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan akibat dari penegakan hukum perda dan perkara	60%		20%	20%	20%
	<b>Sasaran Kegiatan/Sub. Kegiatan :</b>							
1	Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1(Satu) Daerah							
	Kerjasama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan dan Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Kerjasama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan dan Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kerja sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam teknik Pencegahan Kejahatan	3 dokumen		1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen

No	Sasaran Strategis	Rencana Aksi	Indikator Kinerja	Target Tahunan	Target Triwulan			
					I	II	III	IV
5	<b>Meningkatkan Kualitas dan Profesionalisme Kapasitas Sumber Daya Aparatur Satpol. PP</b>	Tingkat pemenuhan kebutuhan diklat/bimtek satpol pp yang diselenggarakan	Jumlah diklat/bimtek satpol pp yang diselenggarakan	100%	25%	25%	25%	25%
		Melaksanakan Pembinaan terhadap Anggota Satpol. PP. atas Pelanggaran Disiplin (PNS / Non PNS)	Persentase Anggota Satpol. PP. yang dibina Karena Pelanggaran Disiplin (PNS / Non PNS)	100%	25%	25%	25%	25%
	<b>Sasaran Kegiatan/Sub. Kegiatan :</b>							
1	Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1(Satu) Daerah							
	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi.	Meningkatkan kualitas Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi.	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	100 Org	25 Org	25 Org	25 Org	25 Org
	Peningkatan Kapasitas SDM Satpol Polisi Pamong Praja dan Satuan Perlindungan Masyarakat termasuk dalam Pelaksanaan Tugas yang Bernuansa Hak Asasi Manusia	Melaksanakan Peningkatan Kapasitas SDM Satpol Polisi Pamong Praja dan Satuan Perlindungan Masyarakat termasuk dalam Pelaksanaan Tugas yang Bernuansa Hak Asasi Manusia	Jumlah Kegiatan SDM Satuan Polisi Pamong praja dan Satuan Perlindungan Masyarakat Termasuk dalam Pelaksanaan Tugas yang Bernuansa Hak Asasi Manusia	3 Keg	1 Keg	1 Keg	1 Keg	1 Keg
6	<b>Meningkatnya Perlindungan Masyarakat di Kabupaten Purwakarta.</b>	Meningkatkan kualitas Pembinaan anggota satlinmas	Persentase anggota satlinmas yang dibina	20%	5%	5%	5%	5%
		Banyaknya pembinaan potensi masyarakat	Persentase pembinaan potensi masyarakat	10%	5%	5%	5%	5%
	<b>Sasaran Kegiatan/Sub. Kegiatan :</b>							
	Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1(Satu) Daerah							
	Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam Rangka Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Meningkatkan kualitas Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam Rangka Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Laporan yang memuat hasil Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketenteraman dan Ketertiban Umum	4 laporan	1 laporan	1 laporan	1 laporan	1 laporan

## **BAB III**

### **PENUTUP**

Rencana Aksi Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Purwakarta ini merupakan bagian dari dokumen perencanaan, yang mendukung pencapaian kinerja sasaran melalui penetapan Rencana Aksi pada setiap indikator kinerja yang ditetapkan. Harapannya adalah meningkatkan kualitas kelembagaan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Purwakarta sebagai pelaksana urusan wajib pemerintah pelayanan dasar bidang ketenteraman ketertiban dan perlindungan masyarakat.

Melalui penyusunan dokumen Rencana Aksi Kinerja ini, dapat membantu pelaksanaan kegiatan yang mendukung pencapaian Indikator Kinerja Utama sehingga menjadi tolok ukur keberhasilan dan kegagalan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Purwakarta.

Dengan demikian, sinergi dan keterhubungan antar unit dan/atau aparatur pada Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Purwakarta menjadi hal penting dalam rangka peningkatan budaya kerja yang lebih baik melalui peningkatan pola sikap, pola kerja, dan pola tindak pada seluruh komponen di Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Purwakarta.

Purwakarta, 04 Januari 2023

**Kepala Satuan Polisi Pamong Praja**  
**Kabupaten Purwakarta**



**AULIA PAMUNGKAS, ST, M.Si**  
810623 200604 1 008